

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA PADA PENINGKATAN PROSES
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PKK) MENUJU GOOD
GOVERNANCE**



OLEH:

SUPRIYADIN

NIM. 21513A0082P

**KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

TAHUN 2019

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA PADA PENINGKATAN PROSES
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PKK) MENUJU GOOD
GOVERNANCE**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata
Satu (S1) Studi Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



OLEH:

SUPRIYADIN

NIM. 21513A0082P

**KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DESA PADA PENINGKATAN PROSES PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN (PKK) MENUJU GOOD GOVERNANCE



Disusun oleh:

SUPRIYADIN
NIM.21513A0082P

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui menjadi skripsi

Mataram, 13 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdurrahman., M.M
NIDN. 0804116101

Dedy Iswanto, ST., MM
NIDN.0818087901

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan



Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PERNGESAHAN
SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DESA PADA PENINGKATAN PROSES PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN (PKK) MENUJU GOOD GOVERNANCE



Disusun oleh:

SUPRIYADIN
NIM.21513A0082P

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: **13 Juli 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Drs. H. Abdurrahman., M.M**
NIDN. 0804116101
2. **Dedy Iswanto, ST.,MM**
NIDN.0818087901
3. **Avatullah Hadi,Sip.,M.ip**
NIDN.0816057902

Ketua

Anggota 1

Anggota II

Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Drs. AMIL, M.M

NIDN. 0831126204

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun perguruan tinggi yang lain.
2. Karya tulis saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain walaupun ada cukup sebagai referensi, kecuali secara teknis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh –sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran serta kepuasan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Mataram, 13 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



SUPRIYADIN
NIM.21513A0082P

MOTTO

Yakinkan dengan iman

Usahakan (ikhtiar) dengan ilmu

Sampaikan dengan amal

Dengan Iman Ilmu dan Amal

“Yakin, Usaha, Sampai”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ribuan tujuan yang ingin disampaikan

Untuk jutaan mimpi yang akan dikejar.

Untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna.

Hidup tanpa ibarat arus sungai, mengalir tanpa tujuan.

Teruslah belajar, berusaha, dan berdo'a untuk menggapainya.

Never give up! Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Ku persembahkan Skripsi ini untuk :

-  *Dae (M. Setiawan), Ma (Sumarni), Kakaku (Dedy Ermawan S.Kom, dan Nita Yuliana S.Pd) dan Adikku (M. Fathir Maulana) yang tidak henti-hentinya berjuang dan mendo'akan untuk setiap langkah ku sampai hari ini.*
-  *Untuk Teman-teman Seperjuanganku ditanah rantauan*
-  *Untuk saudara/i seperjuangan ku, Ikatan Mahasiswa Teke Mataram yang tidak henti-hentinya memberikan semangat kepadaku.*
-  *Rekan-rekan seperjuangan ku, Studi Pemerintahan 2015, dan*
-  *Serta Almamaterku tercinta. Universitas Muhammadiyah Mataram*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmat-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan (Pkk) Menuju Good Governance”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Proses Pemberdayaan Perempuan (Pkk) Menuju Good Governance dan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
2. Bapak Drs. H. M. Junaidi, MM selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Kaprodi Studi Pemerintahan beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Abdurrahman, M.M selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dedy Iswanto, ST.,MM selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
6. Kepala Desa Golong Kabupaten Lombok Barat beserta jajarannya
7. Seluruh Dosen Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama 4 tahun ini.

8. Kedua orang tua ku bapak *M. Setiawan*, dan ibunda Sumarni Kakaku (Dedy Ermawan S.Kom, dan Nita Yuliana S.Pd) dan Adikku (M. Fathir Maulana) tercinta yang telah memberikan do'a, dorongan dan dukungan secara moriil dan materiil selama penulisan skripsi ini.
9. Saudara/i seperjuanganku, Ikatan Mahasiswa Teke Mataram yang telah memberikan semangat bagi penulis.
10. Rekan-rekan Studi Pemerintahan 2015 yang telah saling bertukar pikiran dengan penulis selama 4 tahun ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya atas bantuannya baik berupa materi maupun pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi masih ada kekurangan. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulir berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak –pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pemberdayaan.....	8
2.1.1 Konsep Pemberdayaan.....	9
2.1.2 Tujuan Pemberdayaan	9
2.1.3 Tahap-tahap Pemberdayaan.....	10
2.2 Pemberdayaan Perempuan.....	11
2.3 Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	12
2.4 Pengertian Peran	13
2.5 Pengertian Strategi.....	14
2.5.1 Tingkat-tingkat Strategi.....	14
2.6 Pemerintah Desa	16
2.7 Good Governance	18
2.7.1 Pengertian Good Governance	18
2.7.2 Konsep Good Governance.....	19
2.7.3 Prinsip Good Governance.....	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode yang Digunakan	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3.1 Data Primer.....	27
3.3.2 Data Sekunder.....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data	28
3.4.1 Observasi	28
3.4.2 Wawancara	28
3.5 Metode Analisis Data	28
3.5.1 Pengumpulan Data.....	29
3.5.2 Reduksi Data.....	29
3.5.3 Penyajian Data.....	29
3.5.4 Menarik Kesimpulan	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Desa.....	31
4.1.1 Sejarah Desa Golong	31
4.1.2 Demografi.....	33
4.1.3 Klimatologi.....	34
4.2 Keadaan Sosial	35
4.2.1 Kesehatan Masyarakat.....	35
4.2.2 Tingkat Pendidikan.....	36
4.2.3 Agama Penduduk.....	37
4.3 Keadaan Ekonomi.....	37
4.3.1 Mata Pencaharian.....	37
4.4 Kondisi Pemerintahan Desa Golong.....	38
4.4.1 Pembagian Wilayah Desa Golong.....	38
4.4.2 Profil Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa Golong.....	40
4.4.3 Program Kerja TP. PKK Desa Golong.....	43
4.5 Pembahasan Dan Analisis	44
4.5.1 Peran Pemerintah Desa Pada Peningkatan proses Proses PP	44
4.5.2 Peran Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Good Gavernance	47
4.5.3 Faktor-Faktor Penghambat Dan Peluang	47
4.5.4 Tahap-Tahap Pemberdayaan	50

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan51

5.2 Saran.....53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan tulang punggung perkembangan kemajuan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera pada sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan pembangunan menjadi salah satu gambaran proses dinamika implementasi kebijakan disuatu wilayah tertentu seperti apa yang menjadi amanah pancasila dan undang-undang dasar 1945 yaitu mencapai kesejahteraan umum tanpa ada diskriminasi. Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya (Rudianto, 2015).

Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Keberhasilan pencapaian pembangunan nasional, tidak hanya diukur dari ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari sumber daya manusianya. Perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peran penting untuk membangun bangsa dan negaranya karena perempuan adalah motor penggerak dari pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan sebuah gerakan representatif perempuan yang

mempunyai payung hukum yaitu Kepmendagri No. 53 tahun 2000. Hasil kesejahteraan keluarga itu nantinya dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas hidup keluarga, dan adanya peningkatan ekonomi dari keluarga itu sendiri. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga maka diperlukan akselerasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga melalui Reformasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan keluarga di wilayah kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, dapat dilihat bahwa otonomi daerah merupakan pemberian hak kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan kesiapan dari pemerintah itu sendiri baik dibidang keuangan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai memiliki keberpihakan yang cukup kuat terhadap desa untuk lebih mandiri dan lebih sejahtera. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait proses pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan serta proses pembangunan desa. Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna mendukung kemandirian desa. Undang-Undang Desa setidaknya berisi beberapa kata kunci penting yang membuat desa berbeda dari sebelumnya, baik dilihat dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pertama, dari sisi Politik, semakin jelasnya kewenangan yang dimiliki oleh Desa sebagai pertanda tingginya posisi tawar desa serta perbaikan layanan skala lokal. Undang-Undang Desa memberikan semangat baru terkait dengan diperluasnya kewenangan yang dimiliki oleh desa, baik dari sisi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selain itu, dari sisi politik juga ditandai dengan menguatkan kehidupan berdemokrasi di tingkat lokal, seperti musyawarah desa, kesempatan bagi masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan lembaga kemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial

Desa Golong adalah salah satu Desa dari 21 Desa yang ada di kecamatan Narmada yang berdiri sejak 01 Januari 2011 sesuai dengan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 1522 / 75 / BPMPD / 2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang merupakan pemekaran dari Desa Peresak (Desa Induk) mengingat wilayahnya sangat luas dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memudahkan dalam pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan, tahun 2011 desa Peresak dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Peresak dan Desa Golong. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya pada proses peningkatan pemberdayaan perempuan serta menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada didesa perlu dilakukan pengkajian potensi dan masalah dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD). Untuk itu agar dapat menganalisa suatu potensi dan masalah sangat diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat dan kelembagaan yang ada didesa yang mengedepankan suatu perencanaan pembangunan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Desa Golong memiliki beberapa persoalan yang sangat dibutuhkan peran aktif dari kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah peningkatan proses pemberdayaan perempuan. Untuk itu lahirnya undang-undang otonomi desa merupakan solusi khususnya dalam

hal peningkatan proses pemberdayaan perempuan, maka salah satu harapan bagi desa adalah mampu berinovasi dan memiliki konsep kepemimpinan yang baik.

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan didalamnya maka diperlukan akselerasi pemberdayaan melalui Reformasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). KBBI (2009) menyatakan bahwa “akselerasi adalah proses mempercepat dan menciptakan laju perubahan cepat”. Untuk mewujudkan akselerasi tersebut diperlukan reformasi organisasi didalam organisasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian adalah

- a. Bagaimana peran Pemerintah Desa Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
- b. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menerapkan sistem *good governance* pada Proses Pemberdayaan Perempuan
- c. Apakah faktor-faktor penghambat dan peluang Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Golong Pada Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang otonomi desa.
- b. Bagaimana sistem penerapan *good governance* dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan efektifitas dalam Proses Pemberdayaan Perempuan
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan peluang Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis

- a. Secara teoritis dapat menambah wawasan mengenai upaya atau strategi pemerintah desa dalam menjalankan Amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pemerintah desa Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari proses penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan terdapat beberapa kegunaan penting yaitu :

- a. peneliti dapat turun langsung kelapangan serta memperoleh data secara langsung yang akurat sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan
- b. peneliti dapat menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh serta dapat berusaha memberikan solusi melalui pihak universitas serta lembaga pemerintahan desa ataupun masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*).

Menurut Sumodiningrat, Gunawan, 2002 ; bahwa pada proses pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa pendekatan yaitu : *pertama*, upaya itu harus terarah. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok.

2.1.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan wujud nyata bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat yang pada hakekatnya desa merupakan badan terendah pemerintahan serta memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam undang-undang seperti dalam undang-undang desa no.6 tahun 2014 tentang desa. Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa inggrisnya “*Empowerment*” yaitu pelimpahan kekuasaan atau wewenang yang konteksnya yaitu proses pemberdayaan masyarakat. (Ambar Teguh S, 2004:80-81) “pemberdayaan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan. Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsure partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan objek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki objek. Proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek (Suparjan dan Hemprin, 2003 : 44). Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Desa.

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat

yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Tiga aspek tersebut (afektif, kognitif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut. (Ambar Teguh S, 2004:80-81)

2.1.3 Tahap-tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodingningrat (2004:41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian. (Ambar Teguh S, 2004:82-83)

2.2 Pemberdayaan Perempuan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Keberhasilan pencapaian pembangunan nasional, tidak hanya diukur dari ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari sumber daya manusianya. Perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peran penting untuk membangun bangsa dan negaranya karena perempuan adalah motor penggerak dari pembangunan itu sendiri. Peranan perempuan dalam pembangunan lainnya ialah bagaimana perempuan itu dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mewujudkan keluarga sejahtera, dan lain-lain dalam pembangunan. Tujuan utama pada proses pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Perempuan yang mempunyai kemampuan dan keamanan guna kemandirian, dengan bakal kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terciptanya gerak langkah yang terpadu dan harmonis antara sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi

(kemasyarakatan dan politik), LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan.

2.3 Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Salah satu organisasi yang diharapkan menjadi wadah potensial motor penggerak pembangunan adalah Pembangunan Kesejahteraan Keluarga. Pembangunan Kesejahteraan Keluarga juga melakukan pembinaan kepada keluarga supaya menjadi keluarga yang harmonis, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai usaha ekonomi keluarga. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan sebuah gerakan representatif perempuan yang telah diakui keberadaannya dan mempunyai payung hukum yaitu Kepmendagri No. 53 tahun 2000. Perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peran penting untuk membangun bangsa dan negaranya karena perempuan adalah motor penggerak dari pembangunan itu sendiri. Hasil kesejahteraan keluarga itu nantinya dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas hidup keluarga, dan adanya peningkatan ekonomi dari keluarga itu sendiri. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan didalam disegala sektor maka diperlukan akselerasi melalui Reformasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan keluarga di wilayah kerjanya. Pada wadah ini terdapat 10 program pokok yang menjadi tujuan utama untuk peningkatan pemberdayaan perempuan seperti:

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotong royong

3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Mengembangkan kehidupan berkoperasi.
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan sehat

2.4 Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Artinya Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem yang dijalankannya, atau bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto Peran/peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa peran/peranan adalah

sebuah rangkaian tindak tanduk seseorang yang diharapkan sekelompok orang atau masyarakat untuk dapat menjalankan keinginan atau harapan yang sudah diorganisir.

2.5 Pengertian Strategi

Pengertian Strategi Menurut Wikipedia, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Selanjutnya Siagian (2004) menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pengertian strategi lainnya adalah strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan atau lembaga pemerintahan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

2.5.1 Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan (Suparjan dan Hemprin, 2003:44) menjelaskan adanya dua tingkatan strategi. Dua tingkatan strategi meliputi:

a. *Enterprise Strategy*, Strategi ini berkaitan dengan *respons masyarakat*.

Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Di dalam

masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. *Corporate Strategy*, Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi.

- b. *Functional Strategy*, Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi *functional* yaitu: *Strategi functional ekonomi* yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan. *Strategi functional manajemen*, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating*. Fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah, Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal “ kesehatan ” organisasi dari sudut ekonomi (hanif nurcholis (2011:74)

2.6 Pemerintah Desa

Menurut Siswanto Sunarno (2006:19), yang dimaksud dengan “pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa setempat. Jabatan kepala desa adalah enam tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang Kewenangan Desa meliputi “kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga masyarakat tersebut adalah :

1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, lembaga ini memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa.
2. Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggotanya terdiri atas ibu-ibu rumah tangga di desa

setempat. Wadah ini bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga.

3. Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. Tujuan dari organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu mandiri dan memiliki keterampilan.

Bagian paling penting mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pada tahap identifikasi masalah. Di bidang Kesejahteraan Sosial, masyarakat melalui forum-forum maupun Pokja (kelompok kerja) dapat menyampaikan aspirasi berupa program pembangunan kesejahteraan sosial desa. Hal ini bukan saja nantinya aneka masalah sosial dapat terdeteksi dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa tetapi disini lain juga tergeraknya masyarakat untuk peduli terhadap sesama warganya yang mengalami masalah sosial. Pada tahap selanjutnya Desa akan mampu menangani permasalahan sosial daerahnya secara mandiri. Dengan adanya penyusunan Peraturan desa yang partisipatif sebagai bagian dari undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 maka pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa tersebut memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya termasuk juga meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan terhadap pembangunan desanya. Paska undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 disahkan, maka payung hukum terhadap eksistensi desa menjadi kuat karena desa diatur berdasarkan asas rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan;

musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Hal ini merupakan jawaban atas keberagaman desa di Indonesia. Lebih dari itu, desa menjadi subjek pembangunan pada saat yang sama desa bukanlah subsistem dari pemerintahan kabupaten kota, melainkan sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

2.7 Good Governance

2.7.1 Pengertian Good Governance

Good governance adalah: suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana

investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

2.7.2 Konsep *Good Governance*

Konsep *good governance* dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human

interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik.

Konsep *Good Governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep *Governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sektor* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan masyarakat madani dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut. Dalam konsep ini, Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.7.3 Prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, saya mencoba mengangkat empat prinsip dasar dalam penerapan sistem *good governance* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. (Koentjaraningrat, 2002 :146) Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan. Penggolongan partisipasi masyarakat terbagi kedalam 8 tingkatan berdasarkan tingkat kekuasaan. Shirley Arnstein (1969) mengemukakan penggolongan peran serta masyarakat ke dalam 8 tingkatan berdasarkan tingkat kekuasaan yaitu :

- a. Kontrol masyarakat (*citizen control*)
- b. Pelimpahan kekuasaan (*delegated power*)
- c. Kemitraan (*partnership*)
- d. Penentraman (*placation*)
- e. Konsultasi (*consultation*)

- f. Informasi (*information*)
- g. Terapi (*therapy*)
- h. Manipulasi (*manipulation*).

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Penjelasan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Pasal 127 poin ke-2 menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan local.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.

- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa.
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan.
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

2. Transparansi

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sebagai wujud dari transparansi tersebut maka ditegaskan dalam pasal 127 poin ke-2 huruf E, “mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa”.

3. Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Harbani Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Robbins dalam Tika P. (2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang Digunakan

Peneliti memilih metode penelitian Deskriptif kualitatif oleh karena berusaha belajar secara langsung serta menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui input data dengan proses wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Golong berkaitan.” *peran Pemerintah Desa Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan (PKK) Menuju Good Governance*” dan selanjutnya akan menceritakan kembali sesuai apa yang disampaikan oleh masyarakat . Karena melihat fenomena yang telah terjadi bahwa perempuan pada saat ini belum mendapatkan perhatian secara maksimal pada proses peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang memberikan amanah kepada kepala desa dalam hal upaya yang dilakukan atau strategi yang dilakukan pemerintah desa pada proses peningkatan pemberdayaan perempuan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Ini Dilakukan Di Desa Golong, Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Golong karena menurut peneliti bahwa di Desa Golong Pemerintah Desanya sangat transparansi dalam memberikan data, selain itu desa Golong sangat tepat untuk diteliti terkait proses pemberdayaan perempuan. Penelitian dilakukan melalui proses wawancara

terhadap Ibu PKK, aparat pemerintah desa serta perwakilan masyarakat yang ada di setiap dusun seperti: Dusun Golong, Dusun Bangket Punik, Kebon Nyiuh dan Dusun Peninjoan Kecamatan Narmada Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah aparat pemerintah desa, Ibu-ibu PKK serta masyarakat desa Golong dari perwakilan tiap dusun yang dianggap mempunyai kapasitas dalam proses peningkatan pemberdayaan perempuan.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi atau narasumber yang terpilih, kemudian hasil observasi dicek kebenarannya dengan sumber data lain (data sekunder).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya, tetapi melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis yang bersumber dari dokumen sehingga disebut data documenter, yaitu data atau gambaran tentang lokasi penelitian yang meliputi: keadaan geografi, demografi, ekonomi dan social budaya serta keadaan tata Pemerintahan Desa baik data statis maupun data dinamis.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi secara partisipan dimaksudkan adalah untuk melakukan pengamatan secara partisipatif tentang *peran Pemerintah Desa Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan (PKK) Menuju Good Governance*”

3.4.2 Wawancara

Dalam proses penelitian ini juga dilakukan wawancara terhadap Ibu PKK, aparat pemerintah desa serta perwakilan masyarakat yang ada di setiap dusun .

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel (narasumber) wawancara, menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Narasumber dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara komperhensif mengenai *peran Pemerintah Desa Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan (PKK) Menuju Good Governance*”

1. Kepala Desa Golong beserta jajarannya
2. PKK Desa Golong
3. Masyarakat

3.5 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif mencakup empat kegiatan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Keempat kegiatan tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka langkah yang ditempuh dalam menganalisis data dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi di lapangan.

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan Cara membuat ringkasan, mengkode data, menelusuri data dan membuat gugus-gugus. Proses transformasi ini Akan terus berlangsung hingga laporan lengkap tersusun.

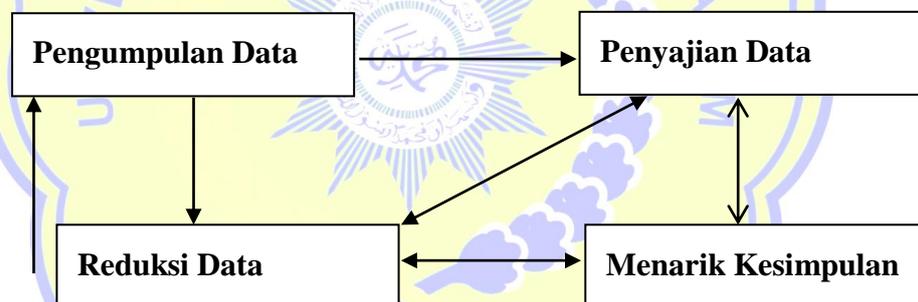
3.5.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi untuk menyederhanakan informasi yang kompleks, kedalam satuan bentuk yang dapat dipahami, penyajian ini bisa dengan matrik, grafik, atau bagan dan di rancang untuk menggabungkan informasi.

3.5.4 Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan data yang terkumpul kedalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya.

Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap jawaban dari setiap permasalahan yang ada. (Matthew G. Miles dan Michael Humberman; 2002 : 82). Dengan uraian analisis diatas, maka dalam penyajian data dan analisis nantinya merujuk pada poin-poin diatas, sehingga hasil dari penelitian untuk skripsi ini dapat terarah dalam pembahasan. Jadi setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif.



Gambar 1. Proses Analisis Data